



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	I
Jenis	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Mantan Satpam Universitas Terbuka (UT)
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 3 November 2009
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	:	Audiensi
Ketua Rapat	:	Dr. Ahmad Nizar Shihab, DSN/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	:	38 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, Ijin 3 orang.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Satpam UT dibuka pukul 10.05 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Permohonan perlindungan hukum terhadap permasalahan PHK yang menimpa 17 Satpam UT, karena hingga saat ini belum mendapat tanggapan dan penyelesaian.
Bahwa pada saat era kepemimpinan Rektor UT yang lama yaitu Prof. Dr. M. Alwi Suparman telah terjadi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para Satpam UT secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas sebagaimana Surat Rektor No. 15035/H31.11.2/KP2008 Tentang Penyampaian Pemberhentian Satpam UT tertanggal 1 September 2008.
2. Bahwa permasalahan PHK ini sudah sangat berlarut-larut dan hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh pihak UT secara arif dan bijaksana.
Permasalahan ini sudah banyak menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, sementara tetap harus menghidupi anak dan istri.
Bahkan permasalahan ini juga sudah memakan korban jiwa, dimana salah satu mantan Satpam menderita sakit sampai meninggal dunia karena tidak tahan menghadapi beban dari permasalahan ini.

3. Para mantan Satpam UT menginginkan kejelasan akan status kepegawaiannya di UT, karena mereka tetap ingin diterima bekerja kembali di UT berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007.
4. Para mantan Satpam UT memohon kepada Ketua dan anggota Komisi IX DPR RI untuk dapat memberikan perhatian dan saran serta jalan keluar terhadap masalah PHK yang telah berlarut-larut dan sangat merugikan. Selain itu mohon agar diberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini baik kepada mantan Satpam maupun pihak UT serta pihak lain yang terkait. PHK bukanlah keputusan yang bijak dalam mengambil keputusan.
5. Komisi IX diharapkan dapat menghadirkan pihak UT dan Disnakertrans Tangerang dan mengusahakan mediasi para Mantan Satpam UT yang bekerja tidak memiliki surat perjanjian kerja, sehingga kurang kuat, namun demikian Komisi IX tetap memberikan perhatian.
6. Masih lemahnya posisi pekerja dalam peraturan perundang-undangan, akan menjadi catatan bagi Komisi IX dalam pembentukan/revisi UU yang terkait.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan simpati kepada anggota Satpam Universitas Terbuka yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
2. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan RDPU dengan pihak rektorat Universitas Terbuka dan/atau melakukan kunjungan *on the spot* langsung ke Universitas Terbuka sebagai langkah mediasi.

Rapat ditutup pukul 11.25 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2009

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Nizar Shihab, DSAN